

# **PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**



## **PERUBAHAN RENCANA KERJA (PERUBAHAN RENJA)**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

**TAHUN 2020**

## **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, sehubungan dengan itu maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menyusun perubahan rencana kerja (Perubahan RENJA) tahun 2020.

Perubahan RENJA Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk menjamin keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dan merupakan bagian dalam tahapan penyusunan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) yang penyusunannya dimulai dengan pendekatan perencanaan partisipatif melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat kota.

Demikian Semoga penyusunan dokumen renja ini bermanfaat bermanfaat sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

**Yogyakarta,**

**KEPALA**

**Ir. Hari Setyowacono, MT**  
**NIP.19640126 199303 1 005**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	.....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	.....	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	.....	<b>I.1</b>
1.1. Latar Belakang	.....	I.1
1.2. Landasan Hukum	.....	I.1 - I.3
1.3. Maksud dan Tujuan	.....	I.3 - I-3
1.4. Sistematika Penulisan	.....	I.3
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II</b>	.....	<b>II.1</b>
2.1. Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan SKPD sampai dengan Triwulan II tahun 2018	.....	II.1
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	.....	II.1 – I.2
2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2018	.....	II.2
2.4. Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah	.....	II.2 – II.4
<b>BAB III PERUBAHAN RENJA SKPD</b>	.....	<b>III.1</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	.....	<b>IV.1</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan tahun 2020, maka Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Perangkat Daerah Tahun 2020. Perubahan ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

1. Perkembangan kondisi di lapangan yang menyebabkan kebutuhan anggaran meningkat
2. Usulan pekerjaan akibat kerusakan ataupun yang menjadi program kota
3. Pergeseran pagu kegiatan antar rekening berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan TW II

### **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Rancangan Awal, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 Urusan Pemerintahan Daerah;

21. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;
22. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 137 Tahun 2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta ;
23. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1. Maksud**

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan.

#### **2. Tujuan**

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 adalah untuk menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran APBDP serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Tahun 2020, agar sejalan dengan target-target pembangunan yang harus dijalankan / direalisasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

### **1.4 Sistematika**

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, sebagaimana dimaksud terdiri dari :

BAB I	Pendahuluan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai Dengan Triwulan II
BAB III	Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD
BAB IV	Penutup
LAMPIRAN	



## **BAB II**

### **EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II**

#### **2.1 Evaluasi hasil Capaian Kinerja Pelayanan PD sampai dengan Triwulan II tahun 2020.**

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II Tahun 2020 menguraikan tentang tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2020, selain itu juga memperhatikan dokumen Resntra sebagai bahan acuan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Analisis Capaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta mulai tahun 2017 didasarkan pada Renstra 2017-2022 dimana indikator program dan target renstra PD telah disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2019 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta triwulan II Tahun 2020 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah.

( Tabel pada Excel )

#### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman.**

Analisis kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Dinas Perumahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2020 masih terdapat kekurangan sarana prasarana pendukung kerja dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk itu perlu adanya tambahan ataupun perbaikan guna



mendukung dan menghasilkan kinerja yang baik sehingga terciptanya pelayanan yang baik kepada masyarakat .

### **2.3. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2020**

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan rencana kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sampai dengan triwulan II tahun 2020 sebagai berikut :

- Capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman sd TW II , fisik 97,54 % sedangkan keuangan 35,14 % .  
Pekerjaan fisik yang ditargetkan pada triwulan II dapat terlaksana sesuai target , namun beberapa **tidak** dapat dilaksanakan disebabkan **adanya realokasi anggaran , dan sudah diakomodir pada penyempurnaan I, II,III dan IV tahun anggaran 2020.**
- Namun ada beberapa tambahan usulan dan pagu anggaran disebabkan dana yang tersedia kurang mencukupi dan beberapa anggaran pada satu rekening perlu dikurangi ataupun dialokasikan ke kebutuhan lainnya.
- Perubahan-perubahan tersebut berpengaruh pada pagu anggaran dan tolak ukur serta target kinerja , maka perlu disesuaikan dengan penyusunan rencana kerja perubahan ( Renja ) Perubahan TA 2020.

### **2.4 Penentuan Isu Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dari hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman, hasil evaluasi pelaksanaan Renja maupun hasil terhadap pencapaian kinerja Renstra , maka selanjutnya dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta, dan untuk menentukan peluang dan tantangan dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi.

#### **Tugas Pokok dan Fungsi**

1. Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2018 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta;

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta memiliki fungsi sebagai :

- (1) Pelaksana urusan umum, kepegawaian, keuangan, administrasi, data dan Pelaporan.
- (2) Pengelolaan kebinamargaan .
- (3) Pengelolaan prasarana pengairan dan drainase.
- (4) Pengelolaan prasarana dasar permukiman, sanitasi permukiman, perumahan dan saluran air limbah .
- (5) Penerangan jalan umum .
- (6) Pengelolaan Bangunan Gedung Pemerintah.

Adapun ketugasan yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;
- e. Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan di bidang pekerjaan umum, perumahan dan kawasan permukiman;

#### • **Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi**

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta menghadapi beberapa permasalahan, kendala maupun hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya penyelenggaraan ketugasan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta , diantaranya adalah :

- a. Pendanaan / anggaran yang tidak sebanding dengan permasalahan pekerjaan umum.
- b. Sarana dan prasarana kerja yang kondisinya tidak cukup layak untuk operasional penyelenggaraan tugas dan fungsi.
- c. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur yang menangani ketugasan teknis. Berkaitan dengan ketugasan teknis pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta.

d. Adanya Keterbatasan Anggaran disebabkan anggaran direalokasikan untuk penanganan dan pencegahan Covid 19

### **BAB III**

## **PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)**

### **TAHUN 2020**

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2020, terdapat beberapa perubahan baik dari segi anggaran, perubahan output kegiatan, penambahan dan pengurangan target kinerja, yang mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja langsung dalam tabel 3.1 .

Dari anggaran murni untuk belanja langsung sebesar Rp. 242.550.182.324,- pada bulan april ketika terjadi pandemi Covid 19 anggaran di realokasikan untuk Belanja tak terduga penanganan pencegahan Covid 19 sehingga menjadi Rp. 115.864.669.159 ,- yang mekanisme penyempurnaan anggaran I, II ,III dalam perjalanannya dengan ditetapkannya perpres 72/2020 dan menghidupkan kembali kegiatan yang bersumber dari dana alokasi khusus ( DAK ) yang sebelumnya pada penyempurnaan anggaran dikurangi untuk kembali dianggarkan sehingga menjadi Rp. 134.186.036.159,- atau bertambah sebesar Rp.18.321.367.000,-

( tabel 3.1 ) Tabel rumusan program dan Kegiatan , terlampir.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta sampai dengan triwulan II tahun 2018 dilaksanakan sebagai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah dan mulai mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Evaluasi yang dilaksanakan adalah terhadap pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan triwulan II tahun 2020 berdasarkan rencana target yang terdapat dalam Rencana Kerja Tahun 2020 secara berkesinambungan maka format penyusunan Perubahan Rencana Kerja disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja program dan kegiatan telah dicapai sampai dengan triwulan II tahun 2020. Untuk itu perlu kerja keras kembali untuk pencapaian target pada tahun 2020 ini sebagai mana telah ditargetkan pada Renstra Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022 dalam rangka menunjang tercapainya Visi dan Misi Walikota Yogyakarta serta target dan sasaran pembangunan yang terdapat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Perubahan Pemerintah Kota Yogyakarta tahun 2020.

Dengan adanya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta Tahun 2020, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi Perangkat Daerah diharapkan akan lebih terakomodasi, terintergrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Yogyakarta maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

# LAMPIRAN

Tabel Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020  
Kota Yogyakarta

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.03.01.001	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Kelancaran Administrasi, Keuangan dan Operasional Perkantoran	100%	100%	2,458,314,824	1,884,917,618	
1.03.01.001.018	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rapat Koordinasi yang terselenggara	125 kali	100 kali	374,470,000	80,730,000	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Laporan perjalanan dinas	23 Laporan	15 kali			
1.03.01.001.020	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	18 orang	18 orang	2,083,844,824	1,804,187,618	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Alat Tulis Kantor yang tersedia	20 jenis	20 jenis			
		Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	5 jenis	5 jenis			
		Surat Dinas yang terkelola	4.120 buah	4.120 buah			
		Bahan dan Peralatan Kebersihan yang tersedia	10 jenis	10 jenis			
		Bahan Bakar Minyak Gas dan Pelumas	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Komputer/printer yang tersedia	18 jenis	18 jenis			
		Jasa pembayaran telepon dan bantuan komunikasi	12 bulan	12 bulan			
		Jasa Pembayaran Listrik	12 bulan	12 bulan			
		Bahan Bacaan/surat kabar yang tersedia	1 jenis	1 jenis			
		Jasa KIR kendaraan dinas/operasional	35 unit	35 unit			
		STNK kendaraan dinas/operasional yang diperpanjang izinnya	63 unit	63 unit			
		Jasa Percetakan	15 jenis	3 jenis			
		Jasa Penggandaan	282.000 lembar	252.000 lembar			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Jasa pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor/ kerja/ kerumahtanggaan	3 jenis	3 jenis			
		Jasa kebersihan kantor	12 bulan	12 bulan			
		Peralatan dan perlengkapan kantor/rumah tangga yang tersedia	1 jenis	3 jenis			
		Jasa sewa tanaman	12 bulan	0			
<b>1.03.01.002</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang memadai</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,068,044,000</b>	<b>619,447,000</b>	
1.03.01.002.022	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Jasa pemeliharaan rutin/berkala dan rehab bangunan kantor dan gudang	1 unit	1 unit	255,000,000	64,000,000	anggaran tetap
1.03.01.002.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jasa pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional :	56 unit	56 unit	813,044,000	555,447,000	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
<b>1.04.01.006</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Persentase Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>123,337,000</b>	<b>15,843,275</b>	
1.04.01.006.005	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian, Laporan Kinerja , Keuangan dan Laporan SDM	6 jenis dokumen	5 jenis dokumen	123,337,000	15,843,275	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
<b>1.03.01.021</b>	<b>Program Pembangunan Gedung Pemerintah</b>	<b>Persentase pemenuhan bangunan gedung sesuai standar kebutuhan</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>	<b>53,365,533,000</b>	<b>23,958,560,648</b>	
1.03.01.021.001	Perencanaan Teknis Gedung Pemerintah	DED dan UKL UPL Bangunan Gedung	6 Dokumen DED dan 3 Dokumen UKL UPL	7 DED	1,040,193,000	691,754,784	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Rekomendasi Keandalan Bangunan Gedung	3 Dokumen Rekomendasi (Bidang Kesehatan, Bidang Pendidikan, Bidang Pemerintahan)	0			
		Pembinaan/Pendampingan Teknis Bangunan Gedung Pemerintah	51 OPD	51 OPD			
		Pelatihan Jasa Konstruksi	2 kali	0			



Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Data Ledger Bangunan yang diupdate	1 Bidang Bangunan	0			
1.03.01.021.002	Pembangunan Gedung Pemerintah	Pembangunan/Renovasi Gedung Pemerintah	12 Lokasi	3 Lokasi	51,841,554,000	23,206,545,864	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pemeliharaan Jaringan Listrik/Tambah daya	1 Pekerjaan	1 Pekerjaan			
1.03.01.021.003	Pengawasan Pembangunan	Rekomendasi IMB	500 IMB	500 IMB	483,786,000	60,260,000	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pengawasan IMB	300 IMB	300 IMB			
		Rekomendasi SLF	50 Dokumen SLF	50 Dokumen SLF			
1.03.01.022	<b>Program Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan</b>	<b>Persentase kualitas sarana dan prasarana jalan, Jembatan dan Bangunan Pelengkap Jalan</b>	<b>88%</b>	<b>-</b>	<b>114,616,358,000</b>	<b>78,211,065,884</b>	
		<b>Persentase kualitas penerangan jalan umum ramah lingkungan</b>	<b>50%</b>	<b>47,03%</b>			
1.03.01.022.001	Peningkatan Jalan dan Jembatan	Luas jalan yang ditingkatkan	61380 m2	6.555 m2	29,895,134,000	16,561,956,000	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Dokumen Perencanaan	6 Dokumen perencanaan	4 Dokumen perencanaan			
		Peningkatan Jembatan	0	1 Lokasi			
1.03.01.022.002	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Luas Jalan yang dipelihara	16.941 m2	9.872 m2	10,683,591,000	4,761,101,384	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Luas Jembatan yang dipelihara	323,5 m2	323,5 m2			
		Dokumen Perencanaan	2 Dokumen perencanaan	2 Dokumen perencanaan			
		Pendataan Jembatan	1 Dokumen pendataan	0			
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemeliharaan Jalan	2 unit	0			
1.03.01.022.003	Pengelolaan Penerangan Jalan Umum	PJU Jalan Protokol yang ditingkatkan	386 titik	120 titik	38,937,633,000	21,788,008,500	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		PJU Jalan Kampung yang ditingkatkan	235 titik	150 titik			
		PJU Jalan Lingkungan yang ditingkatkan	300 titik	0			
		Lampu PJU dan Panel Jaringan yang dipelihara	1000 titik	1000 titik			
		PJU Makam di TPU terpasang	6 Lokasi	0			
		Lampu Sorot Bangunan Haritage Pojok Beteng yang terpasang	1 Pekerjaan	0			
		Pendataan PJU Tahap III	1 Dokumen Pendataan	0			
		Dokumen Perencanaan Peningkatan dan Pemeliharaan PJU	8 Dokumen perencanaan PJU	2 Dokumen perencanaan PJU			
1.03.01.022.555	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofi	Pedestrian Jalan KH A Dahlan DED Pedestrian Jalan KHA Dahlan	1.400 m	1.400 m	35,100,000,000	35,100,000,000	anggaran tetap
		DED Pedestrian Senopati	700 m	700 m			
		Penataan Pedestrian dan Pemasangan PJU Gondolayu-Tugu		900 m Pedestrian			
1.03.01.023	Program Peningkatan dan Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Persentase kualitas saluran pengairan /penyediaan bangunan talud	84,67%	91,34%	35,941,837,500	11,326,682,260	
		Persentase drainase kondisi baik /pembuangan air tidak tersumbat	87,69%	-			
1.03.01.023.001	Peningkatan dan Pembangunan Saluran Pengairan dan Drainase	Pembangunan SAH	3113 m	687,5 m	15,116,500,000	211,665,280	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pembangunan Talud	100 m	0			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
		Perencanaan Pembangunan Talud dan SAH	2 Dokumen perencanaan	1 Dokumen perencanaan			
1.03.01.023.002	Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	Pemeliharaan Talud	260 m	180,8 m	13,825,337,500	4,115,016,980	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pemeliharaan SAH	5188 m	1.250 m			
		Pemeliharaan Saluran Pengairan dan Drainase	366 m	45,7 m			
		Perencanaan Rehabilitasi Talud, SAH, Pengairan	2 Dokumen perencanaan	2 Dokumen perencanaan			
1.03.01.023.555	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	SAH Kawasan Kotagede (jl. Kemasan)	260 m	260 m	7,000,000,000	7,000,000,000	anggaran tetap
<b>1.04.01.026</b>	<b>Program Penataan Perumahan, Permukiman dan Tata Bangunan</b>	<b>Persentase kualitas sarana prasarana dasar permukiman</b>	<b>95,5%</b>	<b>95,5%</b>	<b>34,976,758,000</b>	<b>17,962,504,474</b>	
		<b>Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai</b>	<b>85,09%</b>	<b>85,09%</b>			
1.04.01.026.001	Penataan Perumahan dan Permukiman	Pembangunan Talud Permukiman	749 m3	424,8 m3	11,067,205,000	5,111,014,881	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah	8 unit	0			
		Pembangunan SR dan Saluran Pembawa	497 SR	302 SR			
		Talud Permukiman yang dipelihara	540 m3	581,3 m3			
		Pendataan Septitank Tahap II	1 Dokumen pendataan	0			
		Dokumen Perencanaan	3 Dokumen perencanaan	4 Dokumen perencanaan			
		Sarana Prasarana Permukiman yang dipelihara	9 unit	9 unit			
		Kajian Makam		1 Dokumen			

Kode Program/Kegiatan	Urusan/Program/Kegiatan	Tolok Ukur Program/Kegiatan	Target		Anggaran (Rp)		Keterangan
			Murni	Perubahan	Murni	Perubahan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.04.01.026.002	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Pemeliharaan Sarana Prasarana Fasilitas Umum	4 pekerjaan	2 pekerjaan	16,046,404,000	7,905,863,051	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Penataan Kawasan	4Kawasan	2 Kawasan			
		Peningkatan Kualitas RTLH dan Rumah Terdampak	324 Unit	193 Unit			
		Perencanaan Pencegahan Lingkungan Permukiman Kumuh	6 Dokumen perencanaan	6 Dokumen perencanaan			
		Kajian Penataan Kawasan		2 Dokumen			
		Pendataan Permukiman		1 Dokumen			
1.04.01.026.003	Pengelolaan Rusunawa	Optimalisasi Proteksi Pemadam Kebakaran	1 Rusun	0	2,148,655,000	739,560,042	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Pengelolaan Rusunawa	2 Rusun	2 Rusun			
1.04.01.026.004	Pengelolaan Air Limbah	Pemeliharaan Saluran Air Limbah	1.149 m	1.013 m	5,714,494,000	4,206,066,500	Anggaran berkurang, Realokasi anggaran sesuai SE Permendagri berkaitan dengan penanganan dan pencegahan Covid-19
		Dokumen perencanaan	1 Dokumen	0			
<b>Total</b>					<b>242,550,182,324</b>	<b>133,979,021,159</b>	